

Peluang dan Tantangan *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* Pasca Terbentuknya Kerja Sama Pertahanan Trilateral AUKUS

Pradono Budi Saputro

A. Kurniawan Ulung

Muhammad Abdurrohlim

Al Hafizh

Universitas Satya Negara Indonesia

Abstract

Indonesia and Australia are neighboring countries with fluctuate bilateral relations. In 2018, they formed Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (IA-CSP) to enhance their partnerships in strategic sectors for the stability of regional security in the Indo-Pacific. However, the problem came up in 2021 when Australia established trilateral defense cooperation AUKUS with the United Kingdom and the United States. This cooperation facilitates Australia to have nuclear-powered submarines to strengthen its military power. This condition is against IA-CSP's pillars, particularly pillar on securing the two countries and the region's shared interest, and pillar on contributing to Indo-Pacific stability and prosperity. Therefore, Indonesia regretted Australia's participation in AUKUS because the former deemed the latter to have violated its commitment on IA-CSP. This research aims to analyze IA-CSP's opportunities and challenges post-establishment of AUKUS. It used a qualitative method, with interviews and literature review in place to collect data. The authors used regional security complex theory and strategic partnership concept for analysis. This research found that AUKUS does not disrupt the implementation of IA-CSP because the cooperation instead provides opportunities that Indonesia can utilize for its national interests. However, AUKUS poses challenges that Indonesia needs to tackle.

Keywords: *Indonesia; Australia; strategic partnership; AUKUS; regional security; Indo-Pacific*

Abstrak

Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga dengan hubungan bilateral yang fluktuatif. Pada tahun 2018, keduanya menyepakati Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (IA-CSP) untuk meningkatkan kemitraan pada sektor-sektor strategis dalam rangka menjaga stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik. Akan tetapi, pada tahun 2021, Australia justru membentuk kerja sama pertahanan trilateral AUKUS bersama Inggris dan Amerika Serikat. Kerja sama ini memfasilitasi Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir guna meningkatkan kekuatan militernya. Kondisi ini bertentangan dengan pilar-pilar IA-CSP, terutama pilar keamanan dan kepentingan bersama, dan pilar stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menyayangkan keputusan Australia sebab pembentukan AUKUS dianggap mencederai komitmen terhadap IA-CSP. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan peluang dan tantangan IA-CSP pasca terbentuknya kerja sama pertahanan AUKUS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah regional security complex theory dan konsep kemitraan strategis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa adanya AUKUS tidak secara langsung mengganggu penerapan IA-CSP sebab ada berbagai peluang yang justru dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Meskipun demikian, ada pula berbagai tantangan yang harus Indonesia hadapi dalam hal ini.

Kata-kata kunci: *Indonesia; Australia; kemitraan strategis; AUKUS; keamanan regional; Indo-Pasifik*

Pendahuluan

Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia membuat hubungan antarkedua negara ini menjadi penting dalam usaha membangun konsep keamanan bagi masing-masing negara. Namun, kedekatan geografis ini tidak dibarengi dengan kedekatan diplomatis maupun budaya sehingga membuat hubungan antara Indonesia dan Australia mengalami fase fluktuasi dalam beberapa periode. Antara Jakarta dan Canberra seringkali berada pada posisi yang berlawanan. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan cara pandang antara keduanya (White, 2019).

Perbedaan cara pandang dalam konsep keamanan membuat Indonesia dan Australia belum dapat mengidentifikasi relevansi posisi masing-masing dalam struktur keamanan tersebut walaupun memiliki kepentingan keamanan bersama. Adanya kebutuhan antara Jakarta dan Canberra untuk membangun struktur keamanan regional yang lebih baik, membuat Jakarta dan Canberra berusaha mengembangkan kemitraan strategis yang lebih baik. Dengan meningkatnya tantangan yang ada di kawasan, terutama terkait kebijakan Tiongkok, Indonesia dan Australia perlu membangun kerja sama yang lebih strategis dalam bidang keamanan.

Kemitraan antara Indonesia dan Australia dimulai pada tahun 2006 melalui *Lombok Treaty*. *Lombok Treaty* adalah perjanjian strategis antara Indonesia dan Australia yang diresmikan pada 13 November 2006 di Mataram (Sakti, 2016). Pada tahun 2018, kedua negara menyepakati peningkatan status kemitraannya menjadi kemitraan strategis komprehensif dengan nama *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* (IA-CSP). Dalam IA-CSP, kedua negara bekerja sama pada lima pilar strategis, yaitu ekonomi, *people-to-people relations*, keamanan dan kepentingan bersama, kerja sama maritim, dan stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik (Department of Foreign Affairs and Trade, 2018).

IA-CSP menjadi langkah strategis untuk menjawab berbagai permasalahan regional dan global yang sedang berkembang. Akan tetapi, hingga saat ini IA-CSP belum memberikan kontribusi signifikan bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia walaupun telah berjalan lebih dari empat tahun. Penerapan IA-CSP justru mendapat tantangan baru saat Australia menyepakati kerja sama pertahanan trilateral dengan Inggris dan Amerika Serikat (AS) yang dikenal sebagai AUKUS (*Australia-United Kingdom-United States*) pada tanggal 15 September 2021 (Morrison, Johnson and Biden, 2021). Ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Indo-Pasifik mendesak Australia, AS, dan Inggris mendirikan kerja sama pertahanan ini. Meningkatnya kapabilitas militer dan ekonomi Tiongkok juga menimbulkan keresahan bagi negara-negara di kawasan ini. Oleh karena itu, Australia, AS, dan Inggris membentuk kerja sama ini dengan salah satu program utamanya untuk meningkatkan kapabilitas

militer Australia melalui proyek kapal selam bertenaga nuklir (Morrison and Payne, 2021).

Keputusan ini tentu saja membuat pemerintah Indonesia berada pada posisi dilematis. Pembentukan AUKUS dipandang mencederai komitmen Australia terhadap IA-CSP. Hal ini karena kemitraan strategis sejatinya dibangun atas kesamaan visi dan nilai dari negara-negara yang terlibat dalam kerja sama (Blanco, 2015). Jika kedua negara tidak lagi memiliki visi dan nilai yang sama, lantas kemitraan strategis tidak akan ada artinya lagi. Terlebih, konsekuensi yang dihasilkan oleh kerja sama trilateral ini bagi keamanan regional membuat keberlanjutan komitmen yang ingin dicapai pada IA-CSP dipertanyakan.

Dampak AUKUS terhadap arsitektur keamanan regional Indo-Pasifik telah dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu. Arsitektur keamanan, menurut Snedden (2018), adalah sistem norma, praktik, hubungan, aliansi, dan institusi yang dibangun atau dikembangkan oleh negara-negara untuk menangani, meningkatkan, atau memastikan keamanan internasional dan/atau regional. Berdasarkan definisi tersebut, dampak AUKUS di kawasan Indo-Pasifik adalah munculnya dilema keamanan, terjadinya perlombaan senjata, dan meningkatnya potensi konflik antarnegara. Hal ini diperlihatkan dalam beberapa artikel berikut.

Delanova (2021) menjelaskan bahwa AS, Inggris, dan Australia membentuk AUKUS karena dilandasi agresivitas Tiongkok di Indo-Pasifik, khususnya Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Selat Taiwan. Kehadiran AUKUS menyebabkan keresahan negara-negara di Indo-Pasifik karena akan memicu dilema keamanan. Dilema keamanan akan terjadi akibat kurangnya kepercayaan negara-negara tersebut kepada ketiga negara pemrakarsa AUKUS dalam memelihara keamanan regional. Meskipun begitu, Delanova berargumen bahwa kehadiran AUKUS justru dapat dipandang positif sebab akan memberikan efek *deterrence* terhadap Tiongkok sehingga dapat menekan kemungkinan negara tersebut bersikap unilateral.

Berikutnya, Prakoso (2021) menyebutkan terbentuknya AUKUS mengisyaratkan potensi meningkatnya eskalasi konflik di LTS. Akibatnya, akan banyak kekuatan militer dari negara-negara *non-claimant* yang hadir di LTS. Adanya kontestasi di laut akan mendorong negara-negara yang terlibat untuk meningkatkan kapabilitas militernya sehingga memperbesar potensi terjadinya konflik bersenjata. Sebagai negara yang terletak dekat dengan kawasan konfliktual ini, Indonesia akan terdampak pula sehingga Prakoso menganjurkan Indonesia terus mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, mengedepankan sentralitas *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dan mengedepankan *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP)

Kemudian, Sobarini, Rajab, dan Waluyo (2021) melihat kebangkitan Tiongkok telah menyebabkan dilema keamanan sehingga AS mendirikan AUKUS bersama Inggris dan Australia. Meskipun AUKUS bukanlah bentuk perlombaan senjata, kehadirannya akan mempengaruhi dinamika keamanan Indo-Pasifik karena ketegangan yang ditimbulkannya dapat mendorong perlombaan senjata di kawasan tersebut. Dalam mencegah hal itu terjadi, ASEAN perlu memperkuat arsitektur keamanan regionalnya guna memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan ini.

Selanjutnya, Wene (2021) menyatakan bahwa AUKUS dibentuk sebagai respon trilateral AS, Inggris, dan Australia terhadap agresivitas politik dan militer Tiongkok di Asia-Pasifik. Keberadaan AUKUS telah menyebabkan terbelahnya negara-negara di kawasan, terutama negara-negara anggota ASEAN, sebab ada yang memandang kehadirannya dapat menciptakan stabilitas keamanan regional, namun ada pula yang menilai kehadirannya justru mengakibatkan ketidakstabilan keamanan regional karena memicu perlombaan senjata. Oleh sebab itu, Wene merekomendasikan negara-negara anggota ASEAN agar mengembangkan mekanisme dan strategi keamanan secara berkesinambungan dalam menyikapi berbagai potensi yang dapat berkembang.

Terakhir, Tawakal (2022) berpandangan bahwa AUKUS dibentuk sebagai respon atas peningkatan anggaran militer Tiongkok yang telah menimbulkan dilema keamanan. Namun, beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik menganggap kehadiran AUKUS-lah yang justru menyebabkan dilema keamanan dan berpotensi menyulut perlombaan senjata di kawasan tersebut. Tawakal berargumen AS belum mampu melepaskan diri dari mentalitas Perang Dingin karena langsung mengambil kebijakan berdasarkan dilema keamanan semata sehingga justru membahayakan dirinya dan negara-negara lain.

Meskipun demikian, artikel-artikel di atas tidak mengulas potensi yang ditimbulkan dari adanya AUKUS terhadap kemitraan Indonesia dan Australia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi substansi dengan penelitian terdahulu, di mana penulis berusaha menganalisis peluang dan tantangan IA-CSP pasca terbentuknya kerja sama pertahanan trilateral AUKUS. Analisis dilakukan dengan melihat pola-pola keterlibatan kedua negara di level regional. Isu ini cukup penting untuk dikaji secara lebih mendalam karena menyangkut dua faktor. *Pertama*, posisi Indonesia baik secara geografis maupun politis yang berada tepat di tengah-tengah Indo-Pasifik. *Kedua*, pola hubungan Indonesia dan Australia melalui IA-CSP sebagai salah satu cara untuk menstabilisasi dinamika kawasan melalui kerja sama bilateral.

Argumen utama yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah keberadaan AUKUS tidak secara langsung mengganggu penerapan IA-CSP sebab terdapat berbagai peluang yang justru dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Meskipun demikian, ada pula berbagai tantangan yang harus Indonesia hadapi dalam hal ini. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang-peluang dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada untuk memperkuat arsitektur keamanan regional. Pemanfaatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia dapat menjadi salah satu cara bagi kedua negara untuk dapat mengoptimalkan perannya di kawasan Indo-Pasifik.

Regional security complex

Artikel-artikel terkait AUKUS sebelumnya umumnya dikaji berdasarkan perspektif neorealis (Delanova, 2021; Perdana, Ramasandi and Setiawan, 2021; Sobarini, Rajab and Waluyo, 2021; Wene, 2021; Tawakal, 2022). Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas dengan *regional security complex theory* yang dikembangkan oleh dua akademisi Mazhab Kopenhagen, yakni Barry Buzan dan Ole Wæver. Teori ini memadukan pendekatan materialis dan konstruktivis. Di sisi materialis, teori ini menggunakan gagasan-gagasan teritorialitas terbatas dan distribusi kekuasaan yang dekat dengan neorealisme, namun lebih ditekankan pada level regional. Di sisi konstruktivis, teori ini dibangun atas teori sekuritisasi yang dikembangkan dalam karya-karya Mazhab Kopenhagen sebelumnya (Buzan, 2003).

Regional security complex menjelaskan fenomena internasional yang berpusat pada peningkatan dinamika kawasan. Dinamisnya pertumbuhan kawasan telah berdampak pada aspek keamanan kawasan itu sendiri. Keamanan regional menjadi lebih kompleks ketika poros-poros kekuatan berada pada satu regional yang sama. *Regional security complex* menggambarkan hal tersebut dengan melihat fenomena bahwa perimbangan kekuatan dan struktur internasional yang anarkis merupakan sebuah kesinambungan yang berimplikasi pada kompleksitas keamanan regional (Buzan and Wæver, 2003).

Tujuan dari teori ini adalah untuk menganalisis struktur keamanan pada level regional. Buzan dan Wæver melihat bahwa sistem internasional dapat dipisahkan antara level global dan level regional. Pada level regional, struktur keamanan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor negara (Buzan and Wæver, 2003). Dalam *regional security complex*, sekelompok negara memiliki masalah keamanan utama yang saling terkait erat sehingga mereka menyadari bahwa keamanan nasional satu sama lain tidak dapat dipisahkan (Buzan, 2007).

Struktur utama dari *regional security complex* ini terdiri dari empat variabel (Buzan and Wæver, 2003). *Pertama, boundary* (batas) yang membedakan antara satu *regional security complex* dengan *regional security complex* yang lain. Dunia terdiri atas beberapa *regional security complex*, yang masing-masing dipisahkan oleh batas. Interpretasi mengenai batas antara satu kompleks dengan kompleks lainnya bisa memicu perdebatan, namun *regional security complex* tidak dapat diimplementasikan pada semua kelompok negara. Untuk memenuhi syarat sebagai *regional security complex*, sekelompok negara harus memiliki tingkat interdependensi keamanan yang cukup. Interdependensi inilah yang membedakannya dengan kompleks keamanan lain di sekitarnya.

Kedua, anarchic structure (struktur anarki) yang terdiri dari dua atau lebih unit otonom yang berpengaruh. *Regional security complex* terbentuk dari interaksi antara struktur anarki, perimbangan kekuatan, dan tekanan dari kedekatan geografis antara unit-unit yang ada di dalamnya. Karakter anarki, efek jarak, dan keragaman kondisi geografis menciptakan pola kelompok-kelompok regional di mana interdependensi keamanan terasa lebih intens antara negara-negara di dalam kompleks daripada antara negara-negara di dalam dengan negara-negara di luar kompleks.

Menurut Buzan dan Wæver (2003), mekanisme penetrasi dapat terjadi terjadi di tengah kondisi anarki saat negara-negara dalam kompleks membuat penyesuaian keamanan dengan kekuatan di luar kompleks. Persaingan antarunit di dalam kompleks memberi peluang bagi kekuatan besar di luar kompleks untuk masuk dan melakukan penetrasi ke dalam kompleks. Dalam sistem yang anarki, logika perimbangan kekuatan akan secara alami mendorong unit-unit di dalam kompleks untuk meminta bantuan dari luar kompleks.

Ketiga, polarity (polaritas) yang terbentuk dari distribusi kekuasaan antara unit-unit tersebut. Polaritas mencerminkan distribusi kekuatan di suatu kawasan. Perbedaan polaritas antara satu kawasan dengan kawasan lainnya menyebabkan perbedaan dalam tipe *regional security complex*. Ada *regional security complex* dengan tipe standar, tipe terpusat, dan tipe kekuatan besar. Dalam tipe standar, polaritas ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan regional. Tipe terpusat berbentuk unipolar, di mana hanya ada satu negara yang mendominasi kekuasaan dan tidak berhadapan dengan negara pesaing di kawasan. Adapun dalam tipe kekuatan besar, terdapat lebih dari satu kekuatan besar yang mendominasi kawasan.

Keempat, social construction (konstruksi sosial) yang terbentuk dari pola *amity* dan *enmity* antara unit-unit otonom yang ada di kawasan. Pola *amity* dan *enmity* itu membuat *regional security complex theory* memiliki akar konstruktivisme. Buzan dan

Wæver menjelaskan bahwa pola *amity* dan *enmity* antara unit-unit dalam sistem menentukan bagaimana bentuk *regional security complex* dan bagaimana kompleks ini bekerja. Oleh karena itu, sistem-sistem regional bergantung pada tindakan para aktor dan interpretasi atas tindakannya, bukan sekadar mencerminkan distribusi kekuatan.

Variabel-variabel yang ada pada *regional security complex* tersebut menyatu dengan kondisi regional yang ada di Indo-Pasifik saat ini. Perkembangan Tiongkok dari segi ekonomi dan militer saat ini membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi titik tumpu perkembangan *regional security complex* yang lebih besar akibat perubahan unit dan struktur yang terlibat di kawasan (Buzan and Wæver, 2003). Penggabungan antara kawasan Asia Tenggara dengan kawasan Asia Timur menjadi satu kawasan membuat wilayah ini menjadi jauh lebih kompleks.

Kemitraan strategis

Dengan semakin banyaknya unit yang terlibat dan semakin meningkatnya kompleksitas di kawasan, negara tentu akan berusaha mencari mitra strategis untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Kemitraan adalah sebuah bentuk hubungan bilateral yang dilakukan antara negara dengan negara ataupun antara negara dengan aktor non-negara yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama (Michalski, 2019). Dari fenomena tersebut, kemitraan dapat bertransformasi menjadi sebuah kemitraan yang strategis.

Kemitraan strategis penting bagi negara dalam usaha menjalin kerja sama yang lebih luas, terutama terkait dengan keamanan. Bagi negara, kemitraan strategis penting karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi struktur sistem internasional, membentuk pola hubungan bilateral antarnegara, dan menyediakan ruang bagi negara untuk mendapatkan kepentingannya, baik berupa reputasi yang lebih baik maupun kepentingan ideologis lainnya (Michalski, 2019). Guna membangun kemitraan strategis yang lebih menguntungkan, negara atau unit yang bekerja dalam sistem internasional harus menentukan prinsip dan norma yang berlaku dalam kerja sama strategis tersebut, yang kadangkala hal ini yang menjadi tantangan bagi negara atau unit itu sendiri.

Kemitraan strategis merupakan upaya suatu negara untuk bermitra dengan negara lain ataupun aktor non-negara dalam rangka mendapatkan peluang ekonomi atau merespon ancaman keamanan. Kemitraan strategis juga dapat meminimalisasi risiko sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara secara mandiri. Hal ini dapat menjadi sebuah jalan keluar bagi suatu negara dalam rangka merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada tataran internasional (Wilkins, 2008).

Kemitraan strategis yang dimiliki negara pada akhirnya mampu menjadi garansi bagi negara dalam tatanan sistem internasional yang anarkis.

Dengan kemitraan strategis, suatu negara berpotensi meningkatkan perannya pada tataran internasional (Michalski, 2019). Kemitraan strategis dilakukan oleh negara agar mampu mengatasi permasalahan tertentu. Konsep kemitraan strategis ini menekankan level analisis di level internasional dan level inter-relasional atau bilateral. Pada level internasional, kemitraan strategis muncul sebagai akibat dari sistem internasional yang multipolar. Kemitraan strategis diperlukan oleh suatu negara untuk melengkapi sistem multilateral. Pada level bilateral, kemitraan strategis diharapkan mampu membentuk struktur hubungan bilateral antara satu negara dan negara lainnya. Kemitraan strategis pada level bilateral memungkinkan dua negara yang menjalin hubungan bilateral untuk meningkatkan kerja sama, pertukaran informasi, serta meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya terhadap tataran internasional (Michalski and Pan, 2017).

Kemitraan strategis dibangun untuk kepentingan dan tujuan bersama, bukan untuk melawan kekuatan besar. Bila melihat pola yang berlaku pada kemitraan strategis, maka kesetaraan antarnegara merupakan fokus dari konsep ini. Bentuk kerja sama ini juga harus saling menguntungkan. Konsep kemitraan strategis juga bersifat bilateral. Artinya, kemitraan strategis hanya melibatkan dua aktor.

Kemitraan strategis antaraktor dapat ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Priyandita (2019) menyatakan bahwa kemitraan strategis komprehensif dapat dipandang sebagai peningkatan status kemitraan strategis secara simbolis. Status “komprehensif” ini ditentukan berdasarkan preferensi negara-negara yang terlibat. Secara operasional, kemitraan strategis komprehensif mencakup serangkaian tujuan yang lebih beragam (Priyandita, 2019).

Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership

Kemitraan antara Indonesia dan Australia mulai dijalin sejak kedua negara mencetuskan *Australia-Indonesia Security Arrangement* (AISA) pada 18 Desember 1995. Kemitraan ini berakhir pada tahun 1999 ketika polemik Timor Timur mencuat. Krisis Timor Timur membuat hubungan Indonesia-Australia merenggang. Kala itu, Australia dituding mendukung langkah masyarakat Timor Timur untuk menggelar referendum demi memisahkan diri dari Indonesia (Chalk, 2001). Hal ini menimbulkan permasalahan yang cukup pelik, khususnya terhadap hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Kedua negara mulai kembali menunjukkan gestur positif dalam hubungan bilateral pascatragedi Bom Bali yang memakan 202 korban jiwa, termasuk 38 orang Indonesia dan 88 orang Australia, pada tahun 2002. Peristiwa Bom Bali menuntut kedua negara bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan bersama. Kedua negara memahami pentingnya peningkatan sektor keamanan untuk mengatasi ancaman-ancaman non-tradisional seperti terorisme (Blaxland, 2021).

Berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh kedua negara, diperlukan kemitraan baru yang dapat membantu kedua negara menjawab berbagai tantangan baru pada skala global. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Indonesia dan Australia mendeklarasikan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership*. Deklarasi ini merupakan langkah awal kedua negara untuk menyamakan persepsi atas ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan. *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* kemudian dimanifestasikan dalam *Lombok Treaty* pada tanggal 13 November 2006. *Lombok Treaty* merupakan kemitraan resmi pertama antara Indonesia dan Australia yang meliputi bidang pertahanan dan keamanan.

Dengan *Lombok Treaty*, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung integritas teritorial dan menahan diri dari penggunaan kekuatan. *Lombok Treaty* memainkan peran yang cukup signifikan bagi kelanjutan kemitraan antara Indonesia dan Australia. Dalam Pasal 2 ayat 1 *Lombok Treaty* dinyatakan bahwa traktat ini dibentuk sebagai mekanisme konsultatif kedua negara untuk mengedepankan dialog, pertukaran, dan implementasi kerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan institusional (Parliament of Australia, 2006).

Sejalan dengan tujuan ini, kemitraan Indonesia-Australia kemudian ditingkatkan menjadi “kemitraan strategis” pada Maret 2010. Sebagaimana dikemukakan oleh Michalski dan Pan (2017), kemitraan strategis adalah upaya sejumlah negara yang bermitra untuk membentuk sistem internasional yang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kemitraan strategis dapat dibangun karena didasari oleh sejumlah isu atau persoalan yang tengah dihadapi oleh negara-negara yang bermitra.

Pada tanggal 31 Agustus 2018, kedua negara meningkatkan status kemitraan strategisnya menjadi “kemitraan strategis komprehensif” dengan menandatangani *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* (IA-CSP). IA-CSP merupakan kemitraan multisektor yang terdiri dari lima pilar utama yang berisi tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh kedua negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). *Pertama*, pilar ekonomi dan pembangunan. *Kedua*, pilar konektivitas masyarakat. *Ketiga*, pilar keamanan dan kepentingan bersama. *Keempat*, pilar kerja sama maritim. *Kelima*, pilar stabilitas dan kemakmuran regional Indo-Pasifik.

IA-CSP merupakan kemitraan yang dapat dikatakan istimewa karena mendukung adanya kerja sama yang bersifat komprehensif. Komprehensif dalam konteks ini menjadi faktor yang membedakan kemitraan strategis antarnegara. Kemitraan strategis komprehensif merupakan level yang lebih tinggi daripada kemitraan strategis. Djafar (personal communication, July 13, 2022) menjelaskan kemitraan strategis komprehensif secara lebih terperinci sebagai kemitraan strategis yang lebih mendalam, lebih serius, dan lebih konkret karena mencerminkan keseriusan dalam berbagai kerja sama yang dilaksanakan dan seberapa jauh kerja sama-kerja sama tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kata “komprehensif” berarti kerja sama terjalin luas dan mencakup semua dimensi, kata “strategis” bermakna kerja sama yang berlangsung bersifat jangka panjang dan stabil, dan kata “kemitraan” berarti kerja sama yang dibangun harus sederajat dan saling menguntungkan (Feng and Huang, 2014). Hal ini dapat diamati pula pada IA-CSP yang mencakup beragam aspek yang ingin dikerjasamakan antara kedua negara.

Dalam menerapkan IA-CSP, Indonesia dan Australia menyepakati *Plan of Action* untuk kurun waktu lima tahun antara 2020 sampai 2024. *Plan of Action* tersebut berisi 151 poin terkait sektor-sektor mana saja yang menjadi fokus kemitraan kedua negara sesuai kelima pilar yang telah disebutkan sebelumnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). *Plan of Action* itu memuat pula visi yang berusaha untuk dicapai oleh kedua negara. Visi tersebut menjadi acuan kedua negara untuk bertindak sesuai kesepakatan bersama. Pada tanggal 10 Februari 2020, menteri luar negeri kedua negara hadir menandatangani dokumen tersebut dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia (Heap and Kingsley, 2020).

Kemitraan strategis antara Jakarta dan Canberra dalam IA-CSP memberikan wadah bagi pemerintah kedua negara untuk mengembangkan kerja sama yang lebih luas. Namun, dalam perkembangan kerja sama yang dibangun, kedua negara cenderung lebih fokus pada sektor pertahanan, sebagaimana yang tertuang dalam pilar ketiga dan pilar kelima IA-CSP. Dalam pilar ketiga, kedua negara menyepakati dialog strategis setingkat kementerian. Pada konteks ini, kedua negara sudah menyelenggarakan *2+2 Meeting* setiap tahun sejak 2020. *2+2 Meeting* merupakan dialog strategis yang mempertemukan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Indonesia dan Australia. Selain itu, kedua negara menyepakati pula adanya kerja sama pertahanan dan keamanan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pada pilar kelima, kedua negara sepakat mengelola kawasan Indo-Pasifik dengan mengedepankan aspek-aspek normatif. Dalam dokumen *Plan of Action* dijelaskan bahwa kedua negara mendukung kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Kedua negara juga memanfaatkan institusi internasional seperti ASEAN dan *East Asia Summit*. Maka, kerja sama yang dibentuk melalui pilar ini adalah pengelolaan

kawasan berbasis institusi internasional. Dalam hal ini, kedua negara sepakat mendukung sentralitas ASEAN untuk mengelola stabilitas regional Indo-Pasifik (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Dalam konteks stabilitas regional, aspek keamanan menjadi hal terpenting yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara Indo-Pasifik, khususnya bagi Indonesia dan Australia. Oleh sebab itu, dalam mengelola stabilitas, kerja sama keamanan perlu lebih dikedepankan. Hal ini dilakukan untuk menjamin dinamika yang ada di tingkat regional tidak akan mengganggu aktivitas negara dalam aspek-aspek lain seperti ekonomi dan sosial budaya. Sekalipun begitu, kedua negara berkomitmen dalam IA-CSP, yang merupakan hubungan non-aliansi tertinggi antara kedua negara. Indonesia dan Australia juga bekerja secara berdampingan dalam berbagai isu pertahanan dan keamanan, seperti dalam koordinasi kontraterorisme, latihan militer gabungan, dan kerja sama dalam mengatasi *irregular migration* melalui *Bali Process* (Saha, Bland and Laksmna, 2020).

Pembentukan kerja sama pertahanan trilateral AUKUS di Indo-Pasifik

Sebagai bagian dari *regional security complex* Indo-Pasifik, negara-negara di kawasan melihat keamanan mereka saling terkait satu sama lain. Hadirnya AUKUS tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan di antara mereka. Pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menguraikan dinamika regional Indo-Pasifik berdasarkan empat variabel *regional security complex theory* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pertama, batas. Indo-Pasifik adalah perluasan terminologi Asia-Pasifik yang mencakup Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Lingkar Pasifik. Setelah konsep Asia-Pasifik didekonstruksi menjadi Indo-Pasifik, negara-negara di sepanjang pesisir utara Samudera Hindia juga termasuk di dalamnya. Secara geopolitik, istilah Indo-Pasifik menggabungkan wilayah Samudera Hindia dan wilayah Pasifik Barat (Pratomo and Afrimadona, 2021). Namun, sebagai *regional security complex*, Indo-Pasifik bukan sekadar kumpulan negara-negara dari dua wilayah itu, melainkan negara-negara yang memiliki interdependensi ekonomi dan keamanan satu sama lain. Australia, misalnya, memerlukan negara-negara ASEAN sebagai zona penyangga terhadap ancaman dari musuh-musuhnya (Pramanta *et al.*, 2018).

Kedua, struktur anarki. Perimbangan kekuatan antara Tiongkok dan AS di Indo-Pasifik merupakan dampak struktur anarki. Struktur ini juga berimbas kepada negara-negara di kawasan, tak terkecuali Australia. Dalam sistem internasional yang anarki, Australia membutuhkan kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris sebagai upaya *self-help* di Indo-Pasifik. Upaya ini di antaranya dimanifestasikan

melalui pembentukan kerja sama pertahanan trilateral AUKUS pada 15 September 2021.

Melalui AUKUS, AS dan Inggris berkomitmen membantu Australia memiliki kapal selam bertenaga nuklir untuk angkatan lautnya. Selama 18 bulan sejak pembentukan AUKUS, AS dan Inggris akan menghadirkan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Pengembangan kapal selam bertenaga nuklir Australia akan menjadi upaya bersama di antara ketiga negara itu di bawah prinsip interoperabilitas, kesamaan, dan saling menguntungkan (Morrison, Johnson and Biden, 2021).

Melalui AUKUS pula, Australia berharap memiliki setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir. Bagi Australia, kapal selam bertenaga nuklir ini penting untuk menjaga wilayah perairan, jalur komunikasi laut, dan keamanan nasionalnya. Dibandingkan kapal selam konvensional, kapal selam bertenaga nuklir mempunyai keunggulan dalam hal kecepatan, manuver, dan daya tahan. Ketika beroperasi di daerah konflik, risiko terdeteksi oleh lawan juga lebih kecil (Defence News, 2020).

Ketiga, polaritas. Apa yang saat ini berlangsung di Indo-Pasifik adalah tipe *regional security complex* kekuatan besar karena terdapat lebih dari satu kekuatan global di kawasan ini. Saat ini, ada dua kekuatan global yang saling bersaing dan berhadapan di Indo-Pasifik, yakni Tiongkok dan AS. Pembentukan kerja sama pertahanan trilateral AUKUS semakin mempertegas bipolaritas antara keduanya. Persaingan dan persepertuan antara keduanya menjadi semakin sengit pasca kemunculan AUKUS.

Menurut Buzan dan Wæver (2003), tipe kekuatan besar berbeda dengan dua tipe *regional security complex* lainnya. Perbedaan itu muncul karena dinamika hubungan antara kekuatan-kekuatan global akan langsung mempengaruhi perhitungan perimbangan kekuatan di level global. Di samping itu, dampak yang dirasakan oleh kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kompleks tersebut akan lebih tinggi pula karena yang terlibat adalah kekuatan-kekuatan besar.

Di Indo-Pasifik, polaritas antara Tiongkok dan AS tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pertumbuhan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan anggaran pertahanan Tiongkok sangat terkait dengan perkembangan ekonominya. Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Zhang Yesui, mengatakan bahwa anggaran pertahanan Tiongkok sejalan dengan pembangunan nasional Tiongkok. Anggaran pertahanan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional, mengamankan kepentingan pembangunan, memenuhi tanggung jawab internasional, dan memenuhi kebutuhan reformasi militer (Funairole and Hart, 2021).

Keempat, konstruksi sosial. Menurut Setyawati dan Agussalim (2015), Indonesia dan Australia memiliki pola hubungan *amity* dan *enmity* yang cukup kuat. Sisi *amity* timbul karena kedua negara menghadapi permasalahan serupa. Di sisi lain, aspek

enmity juga tidak dapat diabaikan karena seringnya muncul perbedaan persepsi antara kedua negara terkait isu-isu tertentu. Namun, aspek yang paling mencolok dari pola hubungan antara Indonesia dan Australia adalah *amity*. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kerja sama yang dijalankan kedua negara baik secara bilateral maupun multilateral (Setyawati and Agussalim, 2015).

Australia memiliki arti penting bagi Indonesia dalam memenuhi perannya di kawasan Asia-Pasifik dengan politik luar negeri bebas aktifnya (Silalahi, 1991). Sebaliknya, Australia menganggap Indonesia sebagai mitra keamanan yang berharga. Keamanan dan stabilitas Indonesia dipandang sebagai pusat stabilitas kawasan secara menyeluruh (Evans, 1991). Dengan demikian, kedua negara tetap mempertahankan komitmen yang sudah dibuat walaupun beberapa kali berada pada fase buruk. Berbagai kerja sama pun dijalankan oleh kedua negara bukan semata-mata untuk mengatasi ancaman-ancaman yang ada, melainkan pula untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Australia sebagai negara yang bertetangga.

Kerja sama teknologi pertahanan antara Australia dan AS juga mencerminkan pola *amity*. Bantuan teknologi militer kelas atas yang AS berikan kepada Australia, seperti rudal hipersonik dan *drone* militer, didasari oleh tingginya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Keyakinan bahwa kerja sama ini dapat membuka jalan yang lebih lebar bagi Australia untuk meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan AS dan Inggris telah mendorong didirikannya AUKUS (Cheng, 2022).

Adapun pola *enmity* di Indo-Pasifik semakin meningkat akibat agresivitas Tiongkok. Perilaku Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik, terutama di LTS, tidak hanya dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara yang terlibat secara langsung di LTS seperti Vietnam dan Filipina, tetapi juga oleh Australia (Delanova, 2021). Kekhawatiran Australia atas agresivitas Tiongkok ditunjukkan oleh ketegasan pemerintah Australia dalam menentang klaim teritorial Tiongkok di LTS. Sikap Australia ini selaras dengan sikap AS yang menyatakan bahwa klaim Beijing atas LTS adalah tindakan ilegal (Koestanto, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dibentuknya kerja sama pertahanan ini adalah mempertegas posisi AS dan Australia di Indo-Pasifik sekaligus mengimbangi agresivitas Tiongkok dengan melibatkan Inggris yang mulai memfokuskan diri ke kawasan ini pasca keluar dari Uni Eropa. Pembentukan kerja sama pertahanan tersebut didasari oleh tidak mudahnya mengelola stabilitas keamanan regional Indo-Pasifik dengan adanya rivalitas antara AS dan Tiongkok. Dengan demikian, AUKUS didirikan karena ketiga negara tersebut berkepentingan

untuk mendapatkan dan mempertegas posisi mereka dalam mengelola stabilitas regional Indo-Pasifik (Morrison, Johnson and Biden, 2021).

Sebagai negara yang secara geografis terasing dari sekutu-sekutu tradisionalnya, Australia harus terus mengambil posisi aman dan garansi agar dekat dengan AS. Salah satunya dengan bergabung pada AUKUS. Posisi geografis Australia yang tidak strategis itu membuat Australia selalu merasa sebagai negara yang diabaikan dan ditinggalkan (White, 2019). Agar selalu merasa aman, Australia membutuhkan dukungan militer dari negara besar seperti AS. Oleh karena itu, menjadi bagian dari AUKUS adalah strategi Australia untuk terus menarik hati AS agar selalu berada di sisinya.

Bagi Australia, dukungan militer AS ini sangat penting karena Australia semakin merasa terancam oleh Tiongkok yang semakin agresif di Indo-Pasifik. Ketegangan di LTS berimplikasi pada stabilitas regional sehingga negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, tidak terkecuali AS dan Australia, menginterpretasikannya sebagai ancaman (Perdana, Ramasandi and Setiawan, 2021). Secara geografis, Australia sebenarnya berada cukup jauh dari LTS, namun instabilitas yang terjadi di LTS akan mengancam eksistensinya di kawasan ini mengingat Australia sangat bergantung pada kawasan ini.

Semakin tingginya aktivitas Tiongkok di kawasan membuat Australia sebagai sekutu AS di kawasan memiliki posisi penting dalam rencana kebijakan di tingkat kawasan dan global. Terlebih lagi rencana Tiongkok untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon, Pasifik tentu membuat Australia, sebagai negara yang memiliki kepentingan di kawasan ini, merasa terancam. Meskipun rencana kerja sama Tiongkok dengan Kepulauan Solomon terkait dengan pembangunan pangkalan militer ini ditampilkan oleh pemerintah Solomon (Movono and Lyons, 2022).

Rencana Tiongkok untuk melakukan ekspansi militer ini tentu mengundang pihak atau unit lain merespon kebijakan ini. AS, yang memiliki kepentingan di kawasan sebagai hegemon, memerlukan Australia sebagai mitra dalam membangun kebijakan yang lebih komprehensif dalam membendung Tiongkok. Pengikutsertaan Australia dalam rencana kebijakan AS yang lebih besar membuat Canberra senang karena masih dianggap sebagai mitra penting di kawasan (Fitriani, personal communication, August 2, 2022).

Di sisi lain, bagi Australia, menjadi bagian dari AUKUS juga merupakan pilihan rasional. Australia juga merasa perlu terus meningkatkan kapabilitasnya pertahanannya agar terus merasa aman. Oleh karena itu, Australia menyambut positif tawaran bantuan kapal selam bertenaga nuklir dari AS dan Inggris. Selain pengadaan kapal selam bertenaga nuklir tersebut, AUKUS memiliki sejumlah kesepakatan lain.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berupa peningkatan kapabilitas di bidang siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan kapabilitas patroli bawah laut (Morrison, Johnson and Biden, 2021).

Keikutsertaan Australia pada kerja sama pertahanan ini menimbulkan berbagai pandangan tentang peran negara-negara *middle power* di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS dinilai sebagai manuver AS dengan merangkul Australia yang dikategorikan *middle power*. Sebelumnya, Australia sudah lebih dulu bergabung dalam forum dialog keamanan strategis non-formal melalui *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) pada tahun 2007 hingga saat ini (Buchan and Rimland, 2020). Australia bergabung dengan Quad bersama AS, Jepang, dan India dalam rangka merespon agresivitas Tiongkok di Indo-Pasifik (Smith, 2021). Namun, Quad tidak cukup memberikan dampak yang signifikan bagi negara-negara anggotanya karena hanya bersifat forum dialog non-formal. Aspek ini merupakan salah satu pemicu mengapa AUKUS perlu dibentuk.

Pembentukan kerja sama pertahanan trilateral ini mengundang reaksi beragam dari negara-negara Indo-Pasifik. Reaksi tersebut terpecah antara negara-negara yang mendukung manuver Australia yang ditopang oleh AS dan Inggris dengan negara-negara yang tidak menerima langkah Australia tersebut. Melalui siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menyayangkan keputusan Australia untuk membentuk kerja sama pertahanan ini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Ada beberapa poin yang Indonesia soroti dari adanya AUKUS ini. *Pertama*, keberadaan kerja sama pertahanan di Indo-Pasifik akan menyulut dilema keamanan dan perlombaan senjata. *Kedua*, keberadaan kapal selam bertenaga nuklir yang akan Australia peroleh akan mengganggu implementasi *Non-Proliferation Treaty*. *Ketiga*, komitmen Australia untuk menjaga stabilitas keamanan regional. *Keempat*, kepatuhan Australia terhadap aturan-aturan hukum internasional, termasuk *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Melalui Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas terbentuknya AUKUS. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar oleh *Foreign Policy Community of Indonesia* (2021), Jailani menyampaikan bahwa Indonesia merasa resah sebab langkah Australia ini akan mengubah situasi geopolitik di kawasan mengingat tidak mungkin ada akuisisi kapal selam bertenaga nuklir yang tidak memicu kemungkinan terjadinya perlombaan senjata nuklir. Kekhawatiran ini dilandasi pemikiran bahwa keberadaan AUKUS akan mendorong peningkatan proyeksi

kekuatan yang signifikan di Indo-Pasifik sehingga mengakibatkan destabilisasi kawasan.

Kekhawatiran Indonesia ini cukup beralasan mengingat posisi geografis Australia berada dekat dengan Indonesia. Apapun yang terjadi akibat perlombaan senjata nuklir di Indo-Pasifik akan berdampak langsung maupun tidak langsung ke Indonesia. Hadirnya AS dan Inggris di Australia melalui angkatan laut masing-masing juga membuat wilayah Indonesia semakin rentan dimasuki kapal-kapal selam asing (Asruchin, 2022). Ini tentu akan dianggap sebagai pelanggaran atas kedaulatan dan mengganggu pola *amity* yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia. Maka, Indonesia mengambil sikap dengan menekankan bahwa semua pihak wajib memelihara perdamaian dan keamanan melalui penghormatan atas hukum internasional (Delanova, 2021).

Peluang dan tantangan IA-CSP pasca terbentuknya AUKUS

Tantangan yang dihadapi terkait kemitraan Indonesia dan Australia pada IA-CSP pasca terbentuknya AUKUS ialah potensi munculnya persaingan baru antara kekuatan-kekuatan besar di Indo-Pasifik. Akibatnya, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan akan ikut terancam, dan pilar-pilar IA-CSP akan ikut goyah, terutama pilar ketiga dan pilar kelima. Upaya Indonesia dan Australia untuk mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di Indo-Pasifik melalui IA-CSP akan semakin lebih sulit apabila AUKUS ternyata menyulut persaingan baru.

Kerja sama pertahanan trilateral AUKUS akan menambah kompleksitas kawasan. *Great power competition* yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik ini memaksa negara terus beradaptasi dalam usaha melakukan pertimbangan keamanan untuk masing-masing negara, terutama Indonesia dan Australia. Sebagai negara dengan wilayah geografis yang besar di kawasan, kebijakan kedua negara ini tentu sangat mempengaruhi dinamika *regional security complex* yang sedang terjadi.

Meskipun keberadaan AUKUS bisa memperumit *regional security complex* dan memicu persaingan baru di kawasan, Indonesia sebetulnya dapat memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang. Indonesia bisa menggunakan AUKUS sebagai penyeimbang agresivitas Tiongkok di kawasan. Sejauh ini, Indonesia dan ASEAN belum mampu menjadi penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan. Bahkan menurut Marty Natalegawa, munculnya AUKUS merupakan hasil dari keraguan Indonesia dan ASEAN terhadap *regional security complex* yang terjadi dan perkembangannya yang pesat (Septiari, 2021).

Meskipun hadirnya AUKUS di kawasan memberi tantangan bagi negara-negara di kawasan, hal ini juga mendorong munculnya kesempatan baru. Negara-negara di Indo-Pasifik dapat memanfaatkan AUKUS sebagai peluang untuk membantu mereka mengontrol perilaku agresif Tiongkok di Indo-Pasifik. Dengan ikut hadir secara aktif di kawasan Indo-Pasifik melalui AUKUS, AS dapat membantu membendung kekuatan dan agresivitas Tiongkok (Fitriani, personal communication, August 2, 2022).

Di sisi lain, dengan adanya AUKUS, penulis berpendapat bahwa Indonesia juga bisa menguji keseriusan Australia dalam IA-CSP. Jakarta bisa memanfaatkan IA-CSP tidak hanya untuk menguji komitmen Canberra terhadap kemitraan strategis komprehensif tersebut, tetapi juga untuk memantau perkembangan AUKUS sekaligus mengontrol perilaku agresif Tiongkok. Dengan doktrin politik luar negeri bebas aktifnya, Indonesia harus mampu menekankan diri tidak hanya kepada bagian “bebasnya”, tetapi juga kepada bagian “aktifnya”. AUKUS sebagai kerja sama trilateral dapat ditransformasikan oleh Indonesia sebagai tenaga tambahan dengan keaktifan Indonesia untuk *keep in check* aktor yang bersaing di kawasan.

Adanya IA-CSP antara Indonesia dan Australia bisa dijadikan alat bagi Indonesia untuk terus memantau perkembangan AUKUS. Mengingat panjangnya rentang waktu dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan AUKUS, Indonesia dapat terus berperan aktif dalam menjaga perkembangan keamanan regional, apalagi ditambah Indonesia akan kembali menduduki keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Dengan kembalinya Indonesia menjadi ketua ASEAN, AUKUS bisa dijadikan momentum untuk menguji sentralitas ASEAN di kawasan untuk menghadapi ancaman yang terjadi.

Dengan adanya IA-CSP, Jakarta bisa menguji keseriusan kedua negara dalam melakukan kerja sama. Berdasarkan dokumen *Plan of Action* IA-CSP, pada pilar ketiga dan kelima disepakati beberapa hal penting (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). *Pertama*, mendorong penyelenggaraan berkala serta intensifikasi mekanisme dialog strategis. *Kedua*, kerja sama pertahanan. *Ketiga*, kerja sama melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. Ketiga poin di atas bisa menjadi catatan penting dari rencana aksi yang disepakati antara kedua negara.

Dengan adanya AUKUS, Indonesia bisa menguji komitmen Australia terhadap kerja sama tersebut. Apabila Indonesia bisa melihat komitmen Australia dalam menyepakati kerja sama tersebut, selain bisa menjadi penyeimbang, Jakarta tentu saja bisa saja meningkatkan kerja sama yang lebih komprehensif dengan Canberra. Kerja sama Indonesia dan Australia yang sering kali terus membentur tembok ketika sudah berjalan membuat kedua negara harus meluruskan kembali komitmen

masing-masing. Perbedaan budaya dan cara pandang membuat kedua negara bertetangga ini sulit bisa mempercayai satu sama lain. Hal ini ditambah dengan adanya kecenderungan kedua negara menjadi korban dari politik domestik masing-masing (Fitriani, 2018).

Secara domestik, Indonesia masih kerap menganggap Australia sebagai “orang asing” karena perbedaan budaya dan cara berpikir yang sangat signifikan. Hal ini membuat penduduk Indonesia melihat Australia bukan sebagai negara tetangga, berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Asingnya Australia bagi penduduk Indonesia ini secara signifikan berpengaruh terhadap pola hubungan dan kerja sama yang dibangun oleh pemerintah Indonesia terhadap Australia. “Keasingan” domestik Indonesia terhadap Australia dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Lowy Institute (Kassam, 2021).

Berbagai kerja sama trilateral di bawah AUKUS, terutama terkait teknologi persenjataan, membawa Indonesia dan kawasan menuju perlombaan senjata. Tiongkok, sebagai negara yang menjadi salah satu faktor dibentuknya AUKUS, tentu menjadi target dalam upaya perimbangan kekuatan tersebut. Tiongkok yang mengetahui terbentuknya AUKUS pun sudah pasti tidak akan diam dengan potensi ancaman yang dibuat sehingga menimbulkan persaingan senjata yang semakin masif. Indonesia tentu saja dituntut untuk menjaga agar “bara api ini tidak membesar dan membakar yang lain”.

Indonesia yang pada tahun 2023 akan mengambil alih keketuaan ASEAN dituntut untuk mempertahankan sentralitas organisasi ini dalam usaha menjaga stabilitas regional. Bagi negara-negara anggota ASEAN, menjaga sentralitas dan stabilitas selalu menjadi pusat pembahasan di level strategis maupun diplomatik (Cheng, 2022). Indonesia dan ASEAN harus menyadari arti penting kedua negara bagi stabilitas kawasan karena AS tentu saja tidak akan tinggal diam apabila ASEAN menghalangi kerja sama trilateral mereka dalam usaha menghalangi kebangkitan Tiongkok di kawasan.

Dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN untuk stabilitas kawasan, Indonesia akan melewati jalan yang cukup terjal karena respon anggota ASEAN sendiri dalam menghadapi AUKUS. Kerja sama trilateral *Anglosphere* ini membuat suara ASEAN terpecah sehingga mempersulit proses pembuatan keputusan dan integrasi keamanan di ASEAN. Filipina dan Singapura mendukung kerja sama ini karena kedekatan sejarah terhadap ketiga negara AUKUS (Mohan, 2021), sementara Vietnam ikut mendukung pembentukan AUKUS karena adanya rasa khawatir terhadap Tiongkok mengingat sejarah konflik antara keduanya (Anh, 2021). Reaksi berbeda dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara menganggap AUKUS sebagai

tantangan dalam menjaga stabilitas kawasan ini karena wujud kerja samanya rawan menyebabkan perlombaan senjata (Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, 2021).

Sukma (2021) berpendapat bahwa AUKUS merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari absennya sentralitas ASEAN di kawasan. Dengan demikian, sentralitas ASEAN perlu diprioritaskan daripada hanya terfokus pada keberpihakan antara AS dan Tiongkok atau pada pembentukan pandangan bersama terkait AUKUS (Sukma, 2021). Hal ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam usaha membentuk sentralitas dan isu keamanan bersama di ASEAN yang bisa menjadi penyeimbang persaingan kekuatan besar di kawasan.

Melihat fenomena internasional yang terjadi ini, Indonesia harus bisa melakukan diplomasi yang bertujuan untuk mengukuhkan komunitas internasional terkait perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Apabila Indonesia tidak mampu memainkan peran tersebut, tidak mustahil banyak negara akan berusaha memanfaatkan celah-celah perjanjian internasional dalam mengejar kepentingan sebelah pihak saja pada masa-masa yang akan datang. Indonesia harus mampu berlaku adil terhadap ambiguitas yang terjadi dalam perjanjian internasional. Hal ini juga berlaku bagi kerja sama yang dijalani antara Indonesia dan Australia, termasuk IA-CSP.

Kesimpulan

Keberadaan kerja sama pertahanan trilateral AUKUS ini ternyata tidak secara langsung mengganggu penerapan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Australia melalui IA-CSP. Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Australia untuk memastikan AUKUS tidak akan mencoreng kerja sama dan norma yang telah dibangun di Indo-Pasifik. Dalam penelitian ini didapati bahwa hubungan bilateral kedua negara yang fluktuatif tidak menjamin kedua negara akan saling bertentangan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai situasi dan kondisi di mana kedua negara dapat menurunkan ego masing-masing agar dapat kembali bekerja sama pada isu-isu strategis.

Dengan begitu, terbuka peluang bagi Indonesia dengan keberadaan AUKUS ini. *Pertama*, Indonesia dapat memanfaatkan AUKUS sebagai penyeimbang agresivitas Tiongkok di kawasan. *Kedua*, Indonesia bisa menggunakan AUKUS sebagai momentum untuk menguji sentralitas ASEAN. *Ketiga*, Indonesia dapat terus mendorong inklusivitas dalam mengelola stabilitas regional Indo-Pasifik.

Keempat, Indonesia bisa menguji komitmen Australia dalam IA-CSP untuk meningkatkan kerja sama antarkedua negara.

Meskipun demikian, muncul pula berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. *Pertama*, berbagai kerja sama trilateral di bawah AUKUS akan membawa Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik menuju perlombaan senjata. *Kedua*, upaya Indonesia untuk menjaga sentralitas ASEAN akan lebih berat karena ASEAN sendiri belum satu suara dalam merespon keberadaan AUKUS. *Ketiga*, komitmen Australia terhadap IA-CSP mungkin akan berkurang jika Australia lebih fokus pada kerja sama pertahanan trilateral AUKUS dengan AS dan Inggris.

Terkait peluang dan tantangan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal. *Pertama*, Indonesia perlu mengkomunikasikan kembali komitmen bersama antara Jakarta dan Canberra terkait IA-CSP yang telah disepakati lebih jauh. *Kedua*, Indonesia perlu memastikan agar penerapan kemitraan strategis komprehensif kedua negara tetap sesuai dengan IA-CSP *Plan of Action* yang telah disepakati untuk kurun waktu lima tahun antara 2020 sampai 2024. *Ketiga*, sebagai negara yang memiliki posisi strategis, Indonesia perlu mendorong penerapan AOIP dalam rangka mengupayakan stabilitas keamanan regional di Indo-Pasifik. *Keempat*, Indonesia harus bisa membuat mekanisme kerja sama yang tidak hanya berfokus kepada kepentingan ekonomi seperti yang banyak terkandung dalam pasal-pasal yang ada pada IA-CSP, tetapi juga pada isu-isu pertahanan. *Kelima*, dalam menjaga stabilitas regional Indo-Pasifik, Indonesia sebagai *middle power* perlu melibatkan pihak lain untuk ikut terlibat aktif dalam usaha tersebut.

Daftar pustaka

- Anh, T. (2021) *Vietnam Spells Out Stance on AUKUS*, *Hanoi Times*. Available at: <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html>.
- Asruchin, Y.P. (2022) 'Satu Tahun Kemitraan AUKUS: Dampak terhadap Pengelolaan Isu Laut Tiongkok Selatan, dan Harapan ke Depan', *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 7(2), pp. 11–21.
- Blanco, L.F. de M. y (2015) *On the uses and functions of 'strategic partnership' in international politics: Implications for agency, policy and theory*. Bielefeld University.
- Blaxland, J. (2021) 'Imagining Sweeter Australia-Indonesia Relations', *Journal of Global Strategic Studies*, 1(1), pp. 55–76. Available at: <https://doi.org/10.36859/jgss.v1i1.572>.

- Buchan, P.G. and Rimland, B. (2020) 'Defining the Diamond: The Past, Present, and Future of the Quadrilateral Security Dialogue', *Center for Strategic and International Studies*, (March), pp. 1–16.
- Buzan, B. (2003) 'Security architecture in Asia: The interplay of regional and global levels', *The Pacific Review*, 16(2), pp. 143–173. Available at: <https://doi.org/10.1080/0951274032000069660>.
- Buzan, B. (2007) *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Colchester: ECPR Press.
- Buzan, B. and Wæver, O. (2003) *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chalk, P. (2001) 'Australia and Indonesia: Rebuilding relations after East Timor', *Contemporary Southeast Asia*, 23(2), pp. 233–253. Available at: <https://doi.org/10.1355/CS23-2C>.
- Cheng, M. (2022) 'AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications', *European Journal of Development Studies*, 2(1), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>.
- Defence News (2020) '\$270 Billion Boost to Defence Capability', *Defence News*. Available at: <https://news.defence.gov.au/capability/270-billion-boost-defence-capability>.
- Delanova, M.O. (2021) 'Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik', *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), pp. 259–285. Available at: <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>.
- Department of Foreign Affairs and Trade (2018) *Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*, Department of Foreign Affairs and Trade. Available at: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>.
- Evans, G. (1991) 'Australia's Relations with Indonesia', in D. Ball and H. Wilson (eds) *Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship*. North Sydney: Allen and Unwin Australia Pty Ltd, pp. 1–4.
- Feng, Z. and Huang, J. (2014) 'China's Strategic Partnership Diplomacy: Engaging With a Changing World', *ESPO Working Paper*, (8), pp. 1–20.
- Fitriani, E. (2018) 'President Joko Widodo's Foreign Policy: Implication for Indonesia-Australia Relations', in T. Lindsey and D. McRae (eds) *Strangers*

- Next Door?: Indonesia and Australia in the Asian Century*. Sydney: Bloomsbury Publishing, pp. 31–54.
- Foreign Policy Community of Indonesia (2021) *AUKUS: Responses from Southeast Asia, Foreign Policy Community of Indonesia*. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=nDpeZcsPoCQ>.
- Funaiolo, M.P. and Hart, B. (2021) *Understanding China's 2021 Defense Budget*, CSIS. Available at: <https://www.csis.org/analysis/understanding-chinas-2021-defense-budget>.
- Heap, M. and Kingsley, J. (2020) 'The Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Consequential Legal Document?', *Australian Journal of Asian Law*, 21(1), pp. 131–149.
- Kassam, N. (2021) *Lowy Institute Poll 2021: Understanding Australian Attitudes to the World*. Sydney. Available at: <https://poll.lowyinstitute.org/files/lowyinstitutepoll-2021.pdf>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2020) *Rencana Aksi Untuk Kemitraan Strategis Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Available at: [https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2020-0259 red.pdf](https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2020-0259%20red.pdf).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2021) *Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Available at: https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-submarines-program.
- Koestanto, B.D. (2020) *Australia Tolak Klaim China di Laut China Selatan*, Kompas. Available at: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/07/26/australia-tolak-klaim-china-di-laut-china-selatan/>.
- Michalski, A. (2019) 'Diplomacy in a Changing World Order: The Role of Strategic Partnerships', *The Swedish Institute of International Affairs (UI) Paper*, (10), pp. 3–20.
- Michalski, A. and Pan, Z. (2017) *Unlikely Partners? China, the European Union and the Forging of a Strategic Partnership*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Ministry of Foreign Affairs of Malaysia (2021) *Announcement by Australia, United Kingdom and the United States on Enhanced Trilateral Security Partnership – AUKUS*, Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. Available at: <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/announcement-by-australia-united-kingdom>

m-and-the-united-states-on-enhanced-trilateral-security-partnership-aukus.

Mohan, M. (2021) *Singapore Welcomes Australia's Assurance that AUKUS Will Promote 'Stable and Secure' Asia Pacific: PM Lee, Channel News Asia*. Available at: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-welcomes-australias-assurance-aukus-will-promote-stable-and-secure-asia-pacific-pm-lee-2271826>.

Morrison, S., Johnson, B. and Biden, J. (2021) *Joint Leaders Statement on AUKUS, Prime Minister of Australia*. Available at: <https://web.archive.org/web/20210927191438/https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>.

Morrison, S. and Payne, M. (2021) *Australia to pursue nuclear-powered submarines through new trilateral enhanced security partnership, Joint media statement*. Available at: <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.

Movono, L. and Lyons, K. (2022) *Solomon Islands PM rules out China military base and says Australia is 'security partner of choice', The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2022/jul/14/solomon-islands-pm-rules-out-chinese-military-base-china-australia-security-partner-manasseh-sogavare>.

Parliament of Australia (2006) *Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation, Parliament of Australia*. Available at: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf.

Perdana, D.B., Ramasandi, R.D. and Setiawan, M.E. (2021) 'Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme', *Jurnal Defendonesia*, 5(2), pp. 33–45. Available at: <https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i2.111>.

Prakoso, L.Y. (2021) 'AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia', *Jurnal Maritim Indonesia*, 9(3), pp. 215–222.

Pramanta, R.A. *et al.* (2018) 'Kemitraan Strategis Non-Zero Sum Game: Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik', *Indonesian Perspective*, 3(2), pp. 111–126. Available at: <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22347>.

Pratomo, R.R. and Afrimadona, A. (2021) 'Perkembangan Politik Internasional di Kawasan Indo-Pasifik', in L.M. Fathun and R. Isnarti (eds) *Tinjauan Multiperspektif Kawasan Indo-Pasifik: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, pp. 37–59.

- Priyandita, G. (2019) 'From Rivals to Partners: Constructing the Sino-Indonesian Strategic Partnership', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.7454/global.v21i1.361>.
- Saha, P., Bland, B. and Laksmana, E.A. (2020) *Anchoring the Indo-Pacific: The Case for Deeper Australia-India-Indonesia Trilateral Cooperation*. New Delhi: Observer Research Foundation.
- Sakti, T.R. (2016) 'Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia', *Hubungan Internasional*, 9(1), pp. 99–114.
- Septiari, D. (2021) *Oz seeks to reassure ASEAN after AUKUS gambit*, *The Jakarta Post*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/09/21/oz-seeks-to-reassure-asean-after-aukus-gambit.html>.
- Setyawati, S.M. and Agussalim, D. (2015) 'Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), pp. 111–124. Available at: <https://doi.org/10.22146/jsp.10848>.
- Silalahi, H.T. (1991) 'Australia and Indonesia: Towards a More Positive Relationship', in D. Ball and H. Wilson (eds) *Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship*. North Sydney: Allen and Unwin Australia Pty Ltd, pp. 5–9.
- Smith, S.A. (2021) *The Quad in the Indo-Pacific: What to Know*, *Council on Foreign Relations*. Available at: <https://www.cfr.org/in-brief/quad-indo-pacific-what-know>.
- Snedden, C. (2018) *Regional Security Architecture: Some Terms and Organizations*. Honolulu: Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Sobarini, E., Rajab, D.D.A. and Waluyo, S.D. (2021) 'AUKUS Pact in the Perspective of Security Dilemma', *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(12), pp. 3981–3985. Available at: <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i12-74>.
- Sukma, R. (2021) *Is AUKUS a problem or blessing for ASEAN?*, *The Jakarta Post*. Available at: <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/30/is-aukus-a-problem-or-blessing-for-asean.html>.
- Tawakal, A. (2022) 'Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS', *Global Insight Journal*, 7(1), pp. 18–32. Available at: <https://doi.org/10.52447/gij.v7i1.5446>.

- Wene, A.L. (2021) 'Determinasi Pakta AUKUS terhadap Keamanan Asia Tenggara', *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(2), pp. 142–154. Available at: <https://doi.org/10.33541/japs.v5i2.3990>.
- White, H. (2019) *How to Defend Australia*. Carlton: La Trobe University Press.
- Wilkins, T.S. (2008) 'Russo–Chinese strategic partnership: a new form of security cooperation?', *Contemporary Security Policy*, 29(2), pp. 358–383. Available at: <https://doi.org/10.1080/13523260802284365>.